

A. Kesimpulan

Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2017 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer.
2. Penyelesaian perkara dalam tahun 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun berhasil menyelesaikan perkara melebihi target yang telah ditentukan walaupun masih ada sisa perkara yang belum diselesaikan.
3. Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di wilayah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dilaksanakan dengan tertib.
4. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.

5. Personel Dilmil III-13 Madiun sampai saat ini baik Militer maupun PNS masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban.

6. Hambatan.

Selama Tahun Anggaran 2017 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

a. Bidang Kepegawaian

Personel satuan Pengadilan Militer III-13 Madiun masih sangat kurang, Pada bulan Desember 2013 salah satu Honorer Dilmil III-13 Madiun telah mengikuti Ujian CPNS sesama Honorer K2 atas nama Susriyani, S.H. namun setelah ada pengumuman kelulusan, Anggota kami tersebut tidak lulus tes, anggota kami tersebut telah mengabdikan diri di Pengadilan Militer III-13 Madiun sejak tanggal 21 Oktober 2002 sampai dengan sekarang (15 Tahun), dengan menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta sangat membantu di bidang Umum dan Keuangan serta bidang perencanaan, sehingga mohon kiranya Pimpinan berkenan untuk mempertimbangkan Anggota kami tersebut menjadi PNS.

Selain itu Anggota Honorer yang lain meskipun tidak masuk K2 juga sangat membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sehingga mohon kiranya Pimpinan berkenan untuk mempertimbangkan Anggota kami (para Honorer) tersebut menjadi PNS.

b. Bidang Keuangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, banyak sekali Aplikasi-Aplikasi yang dipakai dibidang keuangan, sedangkan Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun SDMnya sangat terbatas, sehingga mempersulit

kelancaran pekerjaan, dengan keadaan tersebut Dilmil III-13 memanfaatkan tenaga Honorer untuk membantu Tugas Pokok di bidang keuangan.

c. Solusi

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan selama Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta memanfaatkan Tenaga Honorer untuk membantu melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab.

Hal tersebut tentunya dengan melihat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu.

B. Rekomendasi

Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai mana di atas kami sarankan hal-hal sebagai berikut :

Kondisi Personel Dilmil III-13 Madiun saat ini terutama dalam mendukung tugas Non Teknis Yudisial masih sangat kurang khususnya untuk tenaga Staf Administrasi IT sehingga beberapa Personel merangkap tugas lain selain tugas pokoknya.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas direkomendasikan kepada Pimpinan agar pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat berjalan sebagaimana diharapkan sesuai dengan reformasi birokrasi dengan ini mohon diberikan tambahan tenaga IT, selain itu mohon untuk Tenaga

Honorer khususnya yang sudah Masuk Kategori II supaya diprioritaskan untuk segera diangkat menjadi PNS guna kelancaran tugas sebagaimana diuraikan pada kesimpulan diatas.

Demikian laporan Tahunan Tahun Anggaran 2017 kami susun sebagai pertanggung jawaban yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun TA. 2017. Berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon Satuan Atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.

Madiun, 31 Desember 2017

Kepala Pengadilan Militer III-13



Tuty Kiptiani, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P